

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANUA TENGAH KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh :
KORNELIUS JOJITA
NIM. E21112075

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ADD dengan menggunakan teori manajemen George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) dan menganalisis dari segi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Banua Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Banua Tengah sudah dikatakan baik musrenbang desa sudah dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan, pengorganisasian pengelolaan ADD sudah dinilai cukup baik masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan yang mereka miliki, pergerakan dalam pembagian kerjanya sudah baik, dan sesuai dengan indikasi: sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebut untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan masih belum optimal dalam pengelolaan ADD khususnya untuk pembangunan desa seperti pembuatan jalan rapat beton jarang dipantau oleh aparat desa.

Kata-kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN BANUA TENGAH VILLAGE, NORTH PUTUSSIBAU SUB DISTRICT, KAPUAS HULU REGENCY

Abstract.

The purpose of this study is to analyze and describe the Management of ADD Field of Community Empowerment in Banua Tengah Village, North Putussibau Sub, Kapuas Hulu Regency. This writing is intended to know how the management of ADD by using management theory George R. Terry in his book *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) and analyzed in terms of planning, organizing, actuating and controlling in Banua Tengah Village. The research method used in this research is descriptive method of qualitative approach with data collection technique through observation, interview, and documentation. And the results of research conducted by the researchers showed that the planning in the management of ADD in Banua Tengah Village already said both village musrenbang has been implemented to determine the direction of policy, organizing the management of ADD is considered good enough each employee has been placed on the ability they have, Division of work is good, and in accordance with indications: human resources owned by the village to achieve the desired objectives, supervision is still not optimal in the management of ADD, especially for village development such as concrete road meeting is rarely monitored by the village apparatus.

Keywords : Management, Of Village Fund Allocation, For Community Empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. ADD adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk desa, selanjutnya PERDA Kapuas Hulu nomor 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dalam partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada ADD (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi.

Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan otonomi daerah, pimpinan daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya.

2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun identifikasi permasalahan seperti di bawah ini :

1. Anggaran pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai target
2. Anggaran operasional pemerintahan desa tidak sesuai dengan peraturan

3. Fokus Penelitian

Dan peneliti memfokuskan penelitian ini pada : Pengelolaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan : Bagaimana Pengelolaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat penelitian ini yaitu : manfaat teoritis Hasil penelitian dapat menambah informasi ilmiah, keterangan pengelolaan ADD sekaligus dapat menjadi referensi bagi peneliti lain.
2. manfaat praktis Sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan untuk peneliti akan pentingnya Pengelolaan ADD Khususnya Di Desa Banua Tengah

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Insukindro (2004:82) mengemukakan Pengelolaan merupakan : “Serangkaian kegiatan atau tindakan yang meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, penerimaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi. Dalam rangka pengelolaan ADD dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan”.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) Pengelolaan juga bisa diartikan : Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan”.

Adapun fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/pergerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

1. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu : “Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang Pengorganisasian sebagai berikut, yaitu : Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini,

penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. Actuating (Pergerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan Pergerakan yaitu : Pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

4. Controlling (Pengawasan)

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa Pengawasan, yaitu :

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”.

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soleh Chabib & Heru Rochmansjah, (2014:11) ADD adalah :“Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten /Kota. Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai bentuk proses pengelolaan dari berbagai peraturan pemerintah maupun peraturan daerah”.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005:11) Pemberdayaan Masyarakat adalah : "Upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

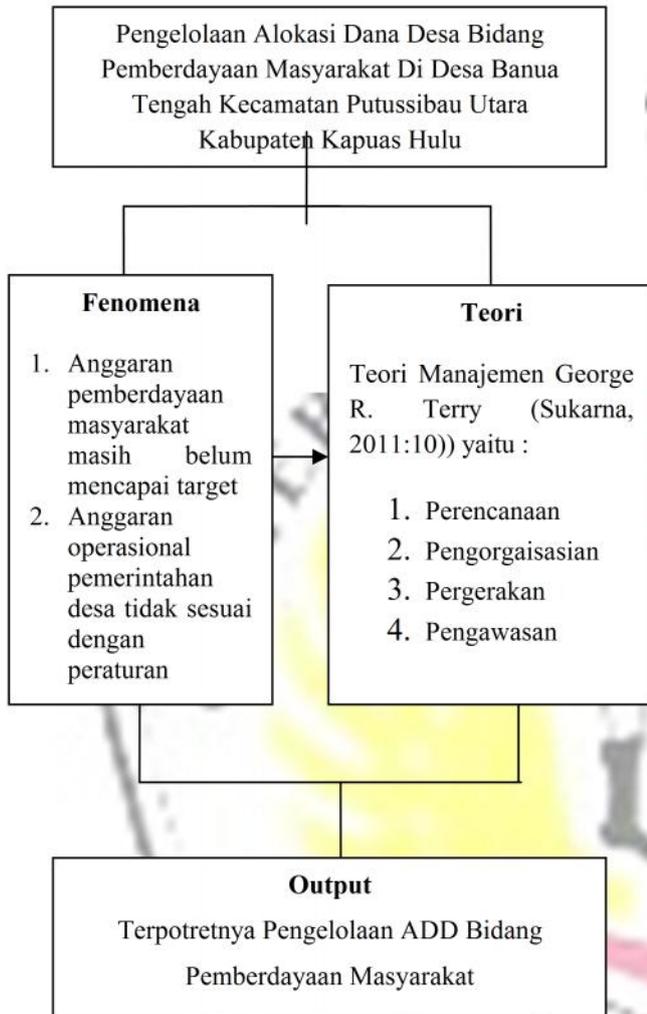
3. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap

pemikiran yang atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Gambar 1.

Kerangka Pikir Penelitian :



maksud deskriptif atau memaparkan suatu objek masalah ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat.

Mukhtar (2013:10), Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif adalah : Suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian suatu saat tertentu. Dan berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, kepala desa sudah mengundang pihak-pihak yang wajib ikut dalam kegiatan perencanaan khususnya dalam kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh pemerintahan desa, BPD dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut membahas apa saja yang menjadi tujuan, kendala-kendala yang dihadapi dan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun yang terjadi ada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk hadir ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan tingkat desa yaitu musrenbang. Hal tersebut tentunya akan mengganggu jalannya perencanaan yang

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk

dilaksanakan oleh pihak desa dan hasil perencanaan pun tidak maksimal.

2. Tahap Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, kepala desa telah memilih aparatur desa dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya dengan cukup baik. Kades beranggapan bahwa yang terpenting adalah aparatur desa yang dipilihnya mau bekerja dengan baik, dalam menjalankan fungsinya seperti membuat LPJ. Selain itu pak kades telah memberikan arahan kepada setiap aparatur untuk mencatat setiap rincian penggunaan dana yang dipakai agar bendahara mudah pada saat penyusunan laporan.

3. Tahap Pergerakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa dalam pembagian kerja perangkat desa di Desa Banua Tengah sudah baik, hal ini dikarenakan kades sudah memberikan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu dalam pelaksanaannya kades telah berkoordinasi dengan BPD untuk bersama-sama ikut serta dalam kegiatan pembangunan agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

4. Tahap Pengawasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber tersebut bahwa kades

telah memberikan perintah kepada setiap aparatur untuk secara bergantian mengawasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dituruti aparatur. Ada aparatur yang tidak mau mengawasi kegiatan dilapangan. Selain aparatur yang diberikan tanggungjawab untuk mengawasi kegiatan, pihak BPD juga dilibatkan. Selain itu kades sesekali mengawasi program pembangunan yang dijalankan. Kades tidak bisa terus menerus untuk memantau kegiatan dilapangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari berbagai pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam proses pengelolaan ADD maka dapat ditarik kesimpulan dengan 4 analisis fungsi manajemen sebagai berikut ini :

1. Untuk perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Banua Tengah sudah dikatakan baik, musrenbang desa sudah dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan dan apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan ADD.
2. Dalam Pengorganisasian pengelolaan ADD sudah dinilai cukup baik, hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan. Adapun rangkap jabatan yang ada di Desa Banua Tengah dianggap tidak

terlalu masalah pada pengelolaan ADD.

3. Dalam Pergerakan untuk pembagian kerjanya sudah baik, dan sesuai dengan indikasi: sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebut untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan.
4. Untuk Pengawasan masih belum optimal dalam pengelolaan ADD khususnya untuk pembangunan desa, hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dan analisis peneliti terhadap kegiatan pembangunan jalan rapat beton jarang dipantau oleh aparatur desa.

F. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah ada, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Banua Tengah dalam pengelolaan ADD sebagai berikut :

1. Dalam hal perencanaan pemerintah desa perlu mengoptimalkan tahap pra musrenbang agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat, selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat desa, dan bisa bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan desa. Serta menentukan skala prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat desa.

2. Dalam hal Pengorganisasian diharapkan untuk Pak Kades Banua Tengah agar dalam penempatan aparatur desa tidak hanya memandang kemauan bekerja aparatur desanya saja tetapi lihat juga kinerja masing-masing aparatur yang ada. Jika kinerja aparatur kurang memuaskan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan lihat kembali apa saja masalah atau kendala aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
3. Dalam hal Pergerakan untuk masing-masing aparatur desa agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada mereka karena tanpa menjalankan tugas dan fungsi tersebut suatu organisasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal.
4. Dalam hal Pengawasan Kades dan pihak BPD harus lebih ditingkatkan lagi, buat kesepakatan kembali tentang pengawasan pengelolaan ADD yang dikelola untuk pembangunan desa. Kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang disetujui dan dipahami oleh masing-masing aparatur dan BPD yang disertai dengan sanksi

contohnya berupa penahanan gaji. Hal ini dilakukan agar masing-masing aparatur desa dan BPD lebih bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya masing-masing.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan penelitian diantaranya :

1. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kata-kata yang menyebabkan peneliti kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam bentuk tulisan.
2. Kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang sudah ada, hal ini dikarenakan adanya perasaan takut kepada atasan apabila memberikan penilaian yang negative. Serta adanya kecurigaan karena khawatir peneliti akan menulis mengenai kejelekan-kejelekan instansi sehingga peneliti harus lebih keras menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti.
3. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan ADD Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan karena peneliti sendiri masih tergolong baru dan pemula dalam melakukan penelitian ilmiah. Kelemahan tersebut khususnya pada keterbatasan dalam melakukan wawancara, teknik pengumpulan data dan analisis data.

H. REFERENSI

Buku-buku

Handyaningrat, Soewarno. 1997. *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.

Insukindro, 2004. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta.

Mukthar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta : Referensi (GP Press Group).

Soleh, Chabib & Heru Rochmansjah, 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Sumaryadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.

Uma Sekaran, 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Kornelius Djita
 NIM / Periode lulus : E21112075 / Periode III 2016 - 2017
 Tanggal Lulus : 20 - Desember - 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi PA
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : 0858-8335-7860

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi L.A.N Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

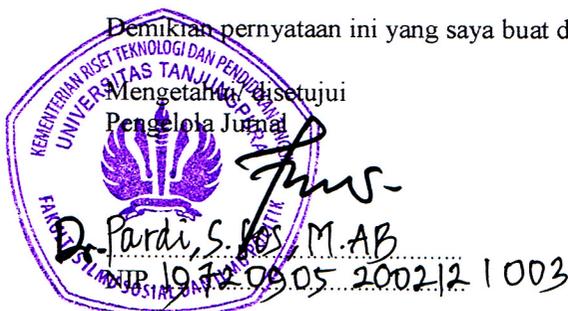
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 21 April 2017

Kornelius Djita
 NIM. E21112075

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)